



## Analisis Kesuksesan Kemampuan Tenaga Kesehatan Menggunakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Najwa Rizkiana Hanum<sup>1</sup>, Mitha Widyaningsih<sup>2</sup>

Universitas Negeri Semarang

Received: 06 Juni 2024

Revised: 13 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

### Abstract

*This article discusses the effectiveness of implementing the Semarang District Health Service program. In this article, various aspects related to health programs implemented by the Semarang District Health Service will be discussed, including the performance of Semarang District Health Service programs that have been implemented, the impact of the programs, evaluation of the programs, and improvement efforts made. can be done to increase the effectiveness of health service programs in the district area.*

*Using descriptive research methods with a qualitative approach, this article aims to provide an in-depth understanding of the effectiveness of health programs run by the Semarang District Health Service. It is hoped that the results of this research can make a positive contribution to the development and improvement of health programs in the region, as well as provide useful insights for related parties in efforts to improve public health in Semarang Regency.*

**Keyword:** *effectiveness, programme implementation, Semarang District Health Office.*

(\*). Corresponding Author: [njwrizkianahanum@students.unnes.ac.id](mailto:njwrizkianahanum@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>

**How to Cite:** Hanum, N. R., & Widyaningsih, M. (2024). Analisis Kesuksesan Kemampuan Tenaga Kesehatan Menggunakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12553595>.

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat agar masyarakat dapat memantapkan kesadaran, kemauan dan kemampuannya untuk hidup sehat dan untuk menyediakan. Maksimalkan peningkatan dan raih tingkat kesehatan tertinggi.

Sumber daya penting bagi setiap organisasi dan bisnis untuk mencapai tujuannya. Sumber daya terdiri dari sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan, dan sumber daya teknologi, namun yang terpenting adalah sumber daya manusia. Karena pembangunan kesehatan bergantung pada keberadaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, maka tidak mungkin tercapainya pelayanan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya tanggung jawab sumber daya manusia. Kesiapan karyawan dicapai melalui rencana kepegawaian yang tepat yang berfokus pada tindakan yang harus diambil manajemen untuk memastikan bahwa orang yang tepat berada dalam organisasi. Berbagai tanggung jawab, tugas dan pekerjaan yang



relevan diselesaikan tepat waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Inisiatif Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan merupakan salah satu landasan pelaksanaan reformasi pembangunan kesehatan dan diharapkan dapat mempercepat dan bersinergi dengan pusat dan daerah melalui alokasi, distribusi, dan pemeliharaan. Ini akan membantu mencapai tujuan Anda dalam jangka menengah dan panjang serta mencapai tujuan pembangunan kesehatan jangka panjang. Tujuan perencanaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan adalah merencanakan sebanyak-banyaknya jumlah, mutu dan sebaran sumber daya manusia (SDM) kesehatan, khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, maritim, dan perbatasan.

Sumber daya manusia di bidang layanan kesehatan terkait erat dan berinteraksi dengan fungsi individu dalam organisasi layanan kesehatan. Pencapaian visi dan misi suatu organisasi memerlukan keterampilan dan kemampuan departemen sumber daya manusia (SDM) yang dapat mendiagnosis permasalahan, melakukan intervensi, dan mencari solusi atas permasalahan yang merupakan misi dan fungsi utama suatu organisasi. Organisasi. Sumber daya manusia tersebut juga dapat menjadi ancaman terhadap implementasi kebijakan, program, dan prosedur operasional strategis jika tidak dikelola dengan baik dan tepat<sup>1</sup>.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perusahaan, kepegawaian memastikan bahwa setiap karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Perlu diketahui lebih lanjut bahwa dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia dilakukan, kinerja individu dan kelompok dievaluasi untuk peningkatan berkelanjutan, dan bahwa karyawan dikembangkan dengan cara yang sesuai untuk memaksimalkan potensi mereka dan mempromosikan merek mereka.

UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan daerah, menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu poin dalam undang-undang ini adalah penyelenggaraan kesehatan baik di tingkat kabupaten maupun kota akan dilaksanakan secara independen dari pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Guna untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat, pemerintah daerah memberikan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Semarang mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang<sup>2</sup>.

Kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara. Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*) merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh undang-undang dasar 1945. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan Kesehatan yang memadai. Memperoleh pelayanan Kesehatan juga merupakan salah satu dari bagian Hak Asasi Manusia sehingga wajib dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 setiap orang berhak memperoleh pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

---

<sup>1</sup> Bagian Administrasi and Fakultas Kesehatan Masyarakat, 'No Title', 5 (2017), 8–13.

<sup>2</sup> Ariandini, A. (2015). Evaluasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 231-240. 'No Title', 1–15.

Oleh karena itu, pemerintah berperan dalam praktik pelayanan Kesehatan termasuk fasilitas Kesehatan.

Jika derajat kesehatan warga suatu negara tinggi, maka penduduknya dianggap berkualitas. Sebaliknya, jika derajat kesehatan warga rendah, maka kualitas penduduk juga cenderung rendah. Saat ini, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Pendapatan masyarakat, lingkungan, fasilitas kesehatan, dan kurangnya tenaga kesehatan adalah beberapa penyebab tingkat kesehatan yang rendah di Indonesia. Kesehatan sangat penting untuk kehidupan, jadi jelas bahwa pemerintah negara ini bertanggung jawab untuk melindungi dan melindungi warganya dari berbagai masalah kesehatan. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai pemerataan kesehatan di seluruh Indonesia<sup>3</sup>.

Di bawah otoritas daerah, Dinas Kesehatan dikelola oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan, pembinaan, dan pengembangan urusan kesehatan, termasuk surveilans kesehatan, pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Setiap wilayah administrasi dan kabupaten administrasi memiliki Departemen Kesehatan<sup>4</sup>.

Tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang untuk menetapkan kebijakan bidang kesehatan, menerapkannya, melakukan evaluasi dan pelaporan, mengelola administrasi dinas kesehatan, dan melakukan fungsi lain yang terkait dengan bidang kesehatan. Pemerintah melalui departemen kesehatan juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kesehatan, kesehatan jasmani, dan kesehatan mental kepada orang-orang dan keluarga mereka. Selain itu, lembaga kesehatan ini menjamin dan mengawasi fasilitas kesehatan di tempat kerjanya, seperti rumah sakit, alat medis, farmasi, dokter, klinik, apotek, dan lain-lain.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, diperlukan visi dan misi yang bermanfaat sebagai pedoman kerja Dinas Kabupaten Semarang. Visi dan Misi ini sangat diperlukan guna tercapainya target dari suatu organisasi. Berikut adalah visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang:

a. Visi

Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera, dan Mandiri (Berdikari) dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbhineka tunggal ika.

b. Misi

- 1.) Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

---

<sup>3</sup> Mewujudkan Semarang Sehat, Jurusan Administrasi Publik, and Universitas Diponegoro, 'No Title'.

<sup>4</sup> B A B li and Landasan Teori, 'No Title', 7-31.

- 2.) Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan, Jasa serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan
- 3.) Meningkatkan Pemerintahan yang baik, bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional
- 4.) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan guna menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- 5.) Meningkatkan kepastian Hukum, penegakan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di semua Bidang Pembangunan
- 6.) Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya
- 7.) Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta melestarikan seni dan Budaya Lokal

Program dinas kesehatan dan hukum administrasi negara mempunyai hubungan terkait karena mereka mengelola dan menjaga berbagai aspek dalam pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa keterkaitan antara program dinas kesehatan dan hukum administrasi negara:

- 1.) Aspek kerja pemerintahan, yaitu tanggung jawab untuk mengatur operasi pemerintah melalui mekanisme penetapan hukum, termasuk dalam hukum administrasi negara. Program dinas kesehatan harus memiliki landasan hukum yang jelas yang berfungsi sebagai normatif dan bertanggung jawab.
- 2.) Program dinas kesehatan melibatkan aspek administratif malpraktek, yang melibatkan pengertian dan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan. Hukum administrasi negara menjelaskan bagaimana pemerintah harus menjaga kelancaran dan keterjangkauan dalam pelayanan kesehatan.
- 3.) Program dinas kesehatan mungkin mengeluarkan sanksi administratif terhadap kemalangan dalam pelayanan kesehatan. Hukum administrasi negara menjelaskan jenis jenis sanksi administratif dalam konteks hukum kesehatan.
- 4.) Program dinas kesehatan harus melibatkan pelayanan kesehatan dan kedokteran, yang melibatkan hubungan antara negara dan individu. Hukum administrasi negara menjelaskan bagaimana pemerintah harus menjaga kelancaran dan keterjangkauan dalam pelayanan kesehatan.
- 5.) Program dinas kesehatan melibatkan perumusan dan penerapan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, layanan kesehatan, dan pencegahan penyakit. Hukum administratif memberikan kerangka hukum di mana kebijakan-kebijakan ini dirumuskan, diterapkan, dan ditegakkan.
- 6.) Dinas kesehatan tunduk pada peraturan hukum administratif, yang mengatur operasi mereka, proses pengambilan keputusan, dan interaksi dengan masyarakat. Hukum administratif memastikan bahwa program dinas kesehatan mematuhi persyaratan hukum, seperti transparansi, proses hukum, dan akuntabilitas.

- 7.) Hukum administratif memainkan peran penting dalam melindungi hak hukum individu dalam konteks pelayanan kesehatan. Hal ini memastikan bahwa individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan melindungi hak-hak mereka dalam interaksi mereka dengan dinas kesehatan dan penyedia layanan kesehatan.
- 8.) Hukum administratif menyediakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dinas kesehatan. Peraturan ini menetapkan prosedur peninjauan, pengajuan banding, dan upaya hukum jika terjadi perselisihan atau keluhan terkait dengan kegiatan dinas kesehatan.

Dalam konteks program dinas kesehatan, hukum administrasi negara menjelaskan bagaimana pemerintah harus menjaga kelancaran dan keterjangkauan dalam pelayanan kesehatan, serta menjelaskan jenis jenis sanksi administratif dalam konteks hukum kesehatan. Singkatnya, hubungan antara program dinas kesehatan dan hukum administrasi sangat penting untuk memastikan penerapan kebijakan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang efektif dan sah, serta melindungi hak-hak hukum individu dalam konteks pelayanan kesehatan.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Terdapat beberapa perumusan masalah terkait hal tersebut :

1. Apakah ada cost/beban didalam program kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana Kinerja program Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang terhadap masyarakat?
3. Dampak apa saja dari kinerja program-program terhadap masyarakat?
4. Bagaimana Evaluasi serta upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bapak Bambang Pujiarto, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, berperan sebagai informan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif biasanya melibatkan analisis yang mendalam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, proses dan makna penelitian deskriptif ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan fokus penelitian sesuai dengan data lapangan.

Peneliti berada di dalam peristiwa atau situasi yang diteliti dalam jenis penelitian ini. Oleh karena itu, ketika peneliti melakukan penelitian dan selama proses menemukan hasilnya, mereka memerlukan kedalaman analisis. Karena, secara umum, tujuan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk mendapatkan data utama dari observasi dan wawancara.

Metode pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan dengan memotong data, yaitu memilah data sesuai kebutuhan.

Setelah itu, data yang dipilah disajikan, dan analisis domain digunakan untuk membuat kesimpulan tentang tanggapan informan.

## PEMBAHASAN

### 1.) **Cost/Beban di dalam program Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang**

Di Dalam Hukum Administrasi Negara terdapat 3 adanya *Cost/Beban* yaitu : *Learning, Competence, Psychological*. Di dalam program Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.

#### 1. *Learning*

Evaluasi tingkat pemahaman peserta atau masyarakat program terhadap informasi kesehatan terbaru, kemampuan mereka untuk mengakses informasi tersebut, dan seberapa baik mereka menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih dirasa kurang, sebab berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak/kurang paham terhadap program yang Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang jalankan.

#### 2. *Competence*

Evaluasi keterampilan teknis karyawan program dalam melaksanakan tugas atau proyek kesehatan, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kompetensi karyawannya telah melakukan penghitungan biaya pelaksanaan asesmen kompetensi, pelatihan secara lanjutan untuk peningkatan keterampilan/keahlian, dan juga biaya sertifikasi profesi.

#### 3. *Psychological*

Evaluasi cost dalam konteks psikologis Dinas Kabupaten Semarang telah melibatkan pengukuran biaya untuk program kesejahteraan mental atau dukungan psikologis bagi karyawan. Hal ini mencakup biaya untuk layanan kesehatan mental, program manajemen stres, atau dukungan kesejahteraan psikologis lainnya. Evaluasi dapat menilai efektivitas relatif dan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis karyawan.

### 2.) **Kinerja Program Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang terhadap masyarakat**

Di dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang mempunyai Struktur organisasi SKTK disini ada 3 bidang & 1 kesekretariatan. Di SKTK itu menunjukkan program-program yang ada disini. Yang pertama di bidang kesekretariatan, ada sub koordinasi umum dan kepegawaian yang mengatur seluruh administrasi kepegawaian dari mulai recruitment, perencanaan, dan keuangan, ketenagaan serta pembiayaan sampai program-program untuk pendekatan nasional seperti pengabdian. Lalu, Bidang P2 yaitu pencegahan dan penanggulangan penyakit dibagi menjadi penyakit menular dan tidak menular serta surveilan dan imunisasi. Mempunyai bagian sendiri-sendiri yaitu 1 kepala bidang dan 3 sub koordinasi, Lalu adanya Bidang Kesehatan Masyarakat ada 3 program kegiatan yaitu kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan kesehatan olahraga. Yang dimana terdapat Sub koordinasi kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan (SISDMK) merupakan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga farmasi dan pembekalan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui observasi, terdapat beberapa program dan upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program-program ini meliputi:

1. Pencegahan, pengendalian, dan penanganan dampak wabah Covid-19: meliputi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, pencegahan dan penanganan stunting, dan meningkatkan angka harapan hidup melalui peningkatan layanan posyandu untuk anak dan orang lanjut usia. Juga untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Upaya lainnya adalah dengan meningkatkan insentif bagi kader posyandu, pemberian kartu kesehatan gratis, pemberian bantuan makanan bergizi, dan penyediaan tenaga pendamping kesehatan guna meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat: antara lain pemberian layanan ambulans gratis, optimalisasi penyediaan air bersih, fasilitasi dan peningkatan sosialisasi dan pencegahan bahaya narkoba, serta pembangunan rumah sakit di wilayah selatan Kabupaten Semarang.
3. Pemantauan kualitas depot air minum isi ulang: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang bersama instansi pemerintah terkait lainnya seperti Departemen Perdagangan melakukan pengawasan langsung ke lapangan dan kunjungan ke seluruh depot air minum isi ulang.
4. Penyempurnaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Selain itu, adanya koordinasi Dinas Kesehatan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program lainnya, adanya salah satu pelaksanaan yaitu Program Rapat koordinasi dengan bidang atau lintas program/lintas sektor baik internal maupun eksternal terkait dengan suksesnya program contoh kerjasama bagian badan perencanaan, Badan Keuangan Daerah (BKuD), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Beberapa program tersebut berjalan hanya kurang optimal harus diintervensi tetapi program-program telah dipublikasikan/diinformasikan melalui upaya sosialisasi, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Masyarakat diundang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang melalui PTTD Dinas Kesehatan dikumpulkan di suatu pertemuan diajarkan untuk bagaimana gerakan masyarakat itu dengan aktivitas kesehatan 15-30 menit setiap hari, makan-makanan yang bergizi, untuk selalu tidak merokok, untuk lingkungan yang bersih dan sehat adanya edukasi, tetapi tidak semua masyarakat mengetahui. Selain itu adanya promosi program Jaminan Kesehatan Nasional (Jaminan Kesehatan Nasional) kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan telah melaksanakan program untuk mengatasi masalah kesehatan mental di kalangan remaja, seperti yang diberitakan

di media. Namun belum diketahui secara pasti sejauh mana masyarakat mengetahui seluruh program yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Beberapa program seperti upaya pencegahan stunting dan pemberian suplemen darah gratis telah diberitakan di media.

Masyarakat di Kabupaten Semarang diikutsertakan dalam berbagai program kesehatan yang digagas pemerintah setempat. Misalnya, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan (Puslat SDM Kesehatan) menyelenggarakan “Sosialisasi Protokol Kesehatan Upaya Pencegahan Covid-19” di Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang protokol pencegahan Covid-19 dan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup. hidup yang lebih sehat. Pemerintah daerah juga mempunyai beberapa program kesehatan, seperti peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penyediaan layanan ambulan gratis, serta fasilitasi dan peningkatan sosialisasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Semarang terlibat aktif dalam berbagai program kesehatan yang digagas oleh pemerintah daerah setempat.

Tingkat kepuasan masyarakat di dinas kesehatan masyarakat memiliki nilai yang baik dan memuaskan sekitar 90% keatas, dibagian kepuasan masyarakat di bidang kesmas (Kesehatan Masyarakat). Dinas kesehatan kabupaten semarang telah menerapkan teknologi atau sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Administrasi sehingga semua orang sudah banyak yang menggunakan aplikasi sistem informasi kesehatan nama aplikasi tersebut yaitu sistem informasi kesehatan dinas kesehatan kabupaten semarang.

Selain itu, untuk menyukseskan visinya dinas kesehatan kabupaten semarang rutin jadwalkan kegiatan, Semua kepala bidang di bawah arahan kepala dinas melaksanakan rencana kegiatan untuk mencapai SPM yang telah ditentukan, SPM merupakan Standar Pelayanan Minimal. Bangkit-bangkit indikator yang harus dicapai masing-masing program. Sudah terdapat rencana kegiatan di masing-masing sub koordinasi atau pelaksanaan. Misalnya, di Sumber daya manusia dan informasi kesehatan seperti bagaimana aplikasi untuk pelaporan dibuat, disusun secara berjenjang berdasarkan hasil survey, jenis kebutuhan yang dipegang. Di bidang seksi lainnya juga demikian, contoh imunisasi dan surveilen maka akan melaksanakan imunisasi dengan target sekian persen (%) penduduk usia balita yaitu harus dilakukan secara terus-menerus seperti itu. Disusun, dilaksanakan, kemudian dilakukan evaluasi secara berkala baik evaluasi bulanan, triwulan, semester, dan pertahun.

Lalu, sarana prasarana dalam program dinas kesehatan kabupaten semarang sudah mempunyai pttid puskesmas di bawah 26 puskesmas untuk pelayanan di tingkat (Fasyankes) sudah dipenuhi oleh pemerintah baik untuk usaha UKM (Usaha Kesehatan Masyarakat) maupun usaha perorangan, program-program nasional yang dibeberapa oleh pemerintah, tetapi kalau sarana dan prasarana pelayanan dasar sudah terpenuhi tetapi untuk optimalisasi misal ada orang yang sakit dengan 10 besar kasus penyakit misalnya Diare, Saluran nafas bagian atas, Gangguan makan ditoleransi, dan penyakit tidak menular lain seperti Diabetes, Hipertensi Jantung, sudah dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun pusat. Upaya nya selalu ada kendala seperti anggaran belum tercukupi, tidak bisa luas jangkauannya, untuk

lebih banyak kegiatan SDM yang harus terbatas. Sarana-sarana teknologi modern harus segera diraih.

### **3.) Dampak kinerja program-program terhadap masyarakat**

Program-program Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang memiliki dampak yang bervariasi terhadap masyarakat. Beberapa dampak yang dapat disorot dari hasil penelitian dan implementasi program-program tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat: Program-program ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, mencegah dan mengobati stunting, dan meningkatkan angka harapan hidup melalui peningkatan layanan posyandu anak, posyandu lansia, dan kesehatan ibu hamil dan menyusui.
2. Peningkatan insentif kader Posyandu anak/lansia di desa/kelurahan : Upaya ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada kader Posyandu anak/lansia di desa/kelurahan.
3. Pelayanan Ambulance Serasi Gratis : Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang menyediakan layanan ambulance gratis untuk masyarakat.
4. Optimalisasi penyediaan air bersih : Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.
5. Pembangunan rumah sakit di Kabupaten Semarang wilayah selatan: Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Selain itu, adanya program lain yaitu Puskesmas Santun Lanjut Usia di Kabupaten Semarang yang belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal penyediaan tenaga kesehatan, pendanaan, dan sarana prasarana. Evaluasi kebijakan jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Semarang juga menunjukkan dampak positif dari program JAMKESDA terhadap warga miskin. Namun, terdapat juga beberapa kendala dalam implementasi program-program kesehatan, seperti kurangnya koordinasi antara penanggung jawab program dengan pelaksana program, serta pembagian tugas dan wewenang yang belum optimal<sup>5</sup>.

### **4.) Evaluasi serta upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program**

Evaluasi dan upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang merupakan hal yang penting untuk memastikan program-program tersebut sehat dan efektif. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diingat:

1. Keberlanjutan dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan: Evaluasi program kesehatan diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan program kesehatan, karena ini dapat berdampak pada pembangunan

---

<sup>5</sup> Ismah Dwi Cahyani, Fitri Indrawati, and Info Artikel, 'HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH', 4.2 (2020), 233–44.

2. Rencana Aksi Program Kesehatan Masyarakat: Untuk mencapai tingkat Rencana Aksi Program Kesehatan Masyarakat, mencakup Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Program Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
3. Monitoring dan Evaluasi P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengatasi masalah penyakit di wilayah dan menciptakan momentum yang signifikan untuk mengatasi masalah penyakit di wilayah.
4. Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat: Studi kasus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang menunjukkan bagaimana program perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan dan dievaluasi.
5. Analisis Efektivitas Program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita (KIBBLA): Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi tahu orang lain tentang seberapa efektif program kesehatan di Kabupaten Semarang.
6. Evaluasi Formal: Metode evaluasi formal menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan cepat mengenai hasil kebijakan.
7. Evaluasi melalui Lokakarya Mini: Puskesmas menggunakan lokakarya mini untuk melakukan evaluasi program.

Selain itu, untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja program kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang juga dapat mempertimbangkan hal-hal seperti meningkatkan anggaran yang bersih dan akuntabel, meningkatkan validitas dan kesinambungan penyediaan data yang mendukung kebijakan program kesehatan masyarakat, dan mengadakan diskusi antar masing-masing kabupaten/kota dengan organisasi profesi, lintas program, dan perguruan tinggi<sup>6</sup>. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan masyarakat, program kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten diharapkan lebih efektif dengan menerapkan langkah-langkah evaluasi dan upaya perbaikan ini<sup>7</sup>.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan & Saran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan di wilayah Semarang dapat ditingkatkan melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil analisis menunjukkan bahwa elemen seperti kepemimpinan, motivasi, dan pelatihan berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan kinerja tenaga kesehatan. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya mendapatkan dukungan organisasi dan lingkungan kerja yang baik untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten, pengembangan Sumber Daya Manusia harus menjadi fokus utama. Peneliti secara khusus mengusulkan

---

<sup>6</sup> Administrasi and Masyarakat.

<sup>7</sup> Kesehatan Ibu and others, 'No Title', November, 2017.

penelitian tambahan untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan di bidang pengembangan sumber daya manusia. Kesehatan Kabupaten Semarang akan ditingkatkan. Petugas kesehatan di bidang pengembangan sumber daya manusia harus selalu menerima pelatihan. Kepala dinas juga disarankan untuk membuat pedoman pelaksanaan promosi agar karyawan yang berprestasi dan berkinerja tinggi dapat mendorong karyawan lain untuk meningkatkan kinerja mereka.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan program masyarakat sudah baik. Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program Puskesmas Lansia Kabupaten Semarang belum sepenuhnya optimal terutama dari segi tenaga kesehatan, pendanaan dan infrastruktur. Evaluasi kontrak jaminan kesehatan daerah di Kabupaten Semarang juga menunjukkan adanya dampak positif program JAMKESDA terhadap masyarakat miskin.

Namun terdapat juga beberapa kendala dalam pelaksanaan program kesehatan, seperti belum adanya koordinasi antara penanggung jawab program dan pelaksana program, serta belum optimalnya pemerataan kerja dan kekuasaan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan program kesehatan, aspek pendukung dan penghambat penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Semarang juga harus diperhatikan.

Dengan demikian, program-program Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, namun masih memerlukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai hasil yang optimal<sup>8</sup>.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Ariandini, A. (2015). Evaluasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 231-240.
- Ardiansyah, W., Widowati, N., & Lestari, H. (2014). Analisis Kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang (dalam mewujudkan Semarang Sehat). *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 56-65.
- Cahyani, I. D., & Indrawati, F. (2020). Program Santun Lanjut Usia di Puskesmas. *Higeia (Journal Of Public Health Research And Development)*, 4(2), 233-244.
- Majalah AULA edisi Juli 2021 - Beda Dalam Kebenaran Sama Dalam Kebaikan. (2021). (n.p.): Majalah AULA.
- Herdiyana, R., Handayani, R., & Yusuf, M. (2018). *Efektivitas Dinas Kesehatan Dalam Program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Serang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Prayogo, A. S. A., Suryoputro, A., & Sriatmi, A. (2017). Analisis Efektivitas Program Kesehatan Ibu Yang Didanai Bantuan Operasional Kesehatan Di

---

<sup>8</sup> Muhammad Kadar Riyadi, 'Inovasi Sistem Manajemen Kinerja SDM Terintegrasi Dengan Big Data Di BPJS Kesehatan PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA', IX.1 (2019).

Puskesmas Bandarharjo Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 5(1), 8-13.

Prayogo, A. S. A., Suryoputro, A., & Sriatmi, A. (2017). Analisis Efektivitas Program Kesehatan Ibu Yang Didanai Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas Bandarharjo Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 5(1), 8-13.

Riyadi, M. K., & Huseini, M. (2019). Inovasi Sistem Manajemen Kinerja Sdm Terintegrasi Dengan Big Data Di Bpjs Kesehatan. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 9(1), 41-54.

**WEBSITE**

<https://main.semarangkab.go.id/profile/visi-misi/>